

**POLA KOLABORATIF DALAM PENGELOLAAN  
KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK) HAURBENTES  
(Collaborative Model in Management of Haurbentes Forest Area for Special Purpose)**

Oleh/By:

Sri Suharti, Tati Rostiwati, dan/and Nina Mindawati

**ABSTRACT**

*Management of Haurbentes Forest Area for Special Purpose (KHDTK) is a new forest management system aiming for research and development, training and education and for cultural and religious activities. According to Minister of Forestry decree No. 289, Haurbentes forest area which was established in 1940 was enlarged from 60 ha to 100 ha. As a consequence of the enlargement and the change of the status of KHDTK, its management would be wider, more varying and involve more stakeholders (local community, Perum Perhutani, local government, universities and other research institutions). In order to anticipate the situation and to increase effective management of the area, it is urged to design an action plan for collaborative work at Haurbentes Forest Area. The objective of the research was to study the potency of Haurbentes forest area that could be developed together with other stakeholders and to formulate guidelines for designing action plan for long-term management. The research was done by using survey method and continued with Focus Group Discussion/FGD. Sample of respondents were selected through purposive random sampling method. The result showed that the prospect of collaborative work in the area was quite promising. All stakeholders who have been interviewed in this research were eager to establish a collaborative work with Forestry Research and Development Agency who has been in charge in its management. Several problems which should be anticipated were clarification of rights and obligations/responsibilities, share of profit and risk, financing, increasing self awareness and self reliance of local people and monitoring and evaluation of activities established in KHDTK. In order to bring about the collaborative work that could provide significant results, several adaptations/modifications in its management including its organizational structure in KHDTK Haurbentes need to be done. Furthermore, it is necessary to carry out intensive and continuous discussions/meetings with all parties involved in the collaborative work, hence potential problems raised during the work could be anticipated before.*

*Key words : Haurbentes forest area for special purpose (KHDTK), management plan, collaboration, stakeholder*

**ABSTRAK**

Pengelolaan KHDTK merupakan bentuk pengelolaan kawasan hutan yang baru di sektor kehutanan. KHDTK diperuntukkan bagi kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan pelatihan serta keperluan budaya dan religi. Hutan Penelitian Haurbentes sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. 289 yang sebelumnya seluas 60 ha dan dibangun pada tahun 1940 sekarang diperluas menjadi 100 ha. Dengan bertambahnya luas hutan yang harus dikelola dan berubahnya status menjadi KHDTK yang implikasinya akan melibatkan lebih banyak parapihak/*stakeholder* (masyarakat setempat, Perhutani, pemda setempat, perguruan tinggi, dan instansi penelitian lainnya), maka tujuan pengelolaannya pun akan lebih luas dan beragam dari sebelumnya. Untuk mengantisipasi kondisi yang ada serta dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan, maka perlu dibuat Rencana Kerja Kolaboratif KHDTK Hutan Penelitian Haurbentes. Tujuan penelitian adalah untuk menggali potensi yang ada yang bisa dikolaboratifkan dengan berbagai *stakeholder* serta tersedianya acuan berupa langkah-langkah yang perlu dilakukan segera di HP Haurbentes dan acuan dasar bagi penyusunan Rencana Tindak (*Action Plan*) untuk pengelolaan jangka panjang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metoda survei dan dilanjutkan dengan *Focus Group Discussion/FGD*. Pemilihan sampel responden dilakukan secara *purposive random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang kerjasama kolaborasi di KHDTK Haurbentes sangat prospektif untuk dilakukan. Hasil wawancara dengan responden terpilih menunjukkan bahwa berbagai *stakeholder* yang terkait dengan keberadaan KHDTK Haurbentes sangat berminat untuk mengadakan kerjasama secara intensif dengan Badan Litbang Kehutanan sebagai pengelola KHDTK. Beberapa masalah yang perlu diantisipasi antara lain adalah kejelasan hak dan kewajiban/tanggung jawab, pembagian keuntungan dan resiko, masalah dana, upaya peningkatan kesadaran dan kemandirian masyarakat setempat serta pengawasan kegiatan yang berlangsung di KHDTK. Untuk merealisasikan agar kerjasama tersebut benar-benar dapat memberikan manfaat yang nyata, beberapa upaya adaptasi/modifikasi dalam pengelolaan KHDTK termasuk struktur organisasinya perlu dilakukan. Selain itu, pertemuan/diskusi secara rutin dan intensif dengan pihak-pihak yang bekerjasama perlu dilakukan agar berbagai masalah yang timbul dari adanya kerjasama tersebut dapat diantisipasi sebelumnya.

Kata kunci : KHDTK Haurbentes, rencana pengelolaan, kolaborasi, *stakeholder*

## I. PENDAHULUAN

Sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan No. 288/KPTS-II/2003 tentang penunjukan hutan Haurbentes seluas  $\pm$  100 ha sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 289/KPTS-II/2003 tentang penggunaannya sebagai hutan penelitian maka pengelolaannya diserahkan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Departemen Kehutanan.

Dalam melakukan perencanaan kegiatan (*action plan*) pada kawasan tersebut, Badan Litbang Kehutanan menghadapi berbagai kendala yang perlu segera diantisipasi seperti lokasi KHDTK yang berbatasan dengan kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani dan pemukiman penduduk setempat serta minimnya sarana dan prasarana yang tersedia, baik dari segi bangunan, peralatan maupun sumberdaya manusia (SDM) yang ada. Namun di sisi lain ada beberapa keunggulan yang dimiliki KHDTK Haurbentes seperti lokasi yang relatif dekat serta mudah dijangkau, keanekaragaman jenis pohon (*Dipterocarpaceae* dan *non Dipterocarpaceae*) dan fauna yang ada cukup tinggi.

Hutan Penelitian (HP) Haurbentes sesuai Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, luas sebelumnya 60 ha dan dibangun pada tahun 1940 sekarang diperluas menjadi 100 ha. Dengan bertambahnya luas hutan yang harus dikelola dan berubahnya status dari pinjam pakai menjadi KHDTK yang implikasinya akan melibatkan lebih banyak parapihak (*stakeholder*) seperti masyarakat setempat, Perhutani, Pemerintah Daerah (Pemda), perguruan tinggi/PT, dan instansi penelitian lainnya, maka tujuan pengelolaannya pun akan lebih luas serta beragam dari sebelumnya. Agar pengelolaannya lebih terarah dan berdaya guna, maka pada tahap awal perlu dibuat Rencana Kerja Kolaboratif KHDTK Hutan Penelitian Haurbentes. Untuk mengatasi berbagai permasalahan serta sekaligus memanfaatkan potensi yang ada di KHDTK Haurbentes melalui peluang-peluang kerjasama, telah dilakukan kajian terhadap

berbagai *stakeholder* yang terkait dengan KHDTK Haurbentes seperti masyarakat setempat, Perum Perhutani, Pemda, perguruan tinggi serta lembaga penelitian lain. Tujuan penelitian adalah untuk menggali potensi yang ada yang bisa dikolaborasikan dengan berbagai *stakeholder* di atas serta tersedianya salah satu acuan berupa langkah-langkah yang perlu dilakukan segera di IIP Haurbentes dan acuan dasar bagi penyusunan Rencana Tindak (*Action Plan*) untuk pengelolaan jangka panjang.

## II. METODOLOGI

### A. Deskripsi Lokasi dan Waktu Penelitian

KHDTK Haurbentes secara administrasi pemerintahan termasuk Desa Curug, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Sedangkan menurut administrasi kehutanan termasuk ke dalam Resort Polisi Hutan (RPH) Jasinga, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Jasinga, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor. Jarak KHDTK Haurbentes dari kota Bogor  $\pm$  60 km arah ke Rangkasbitung dengan total luas kawasan 100 hektar yang terletak pada ketinggian  $\pm$  250 m di atas permukaan laut.

Berdasarkan pengamatan suhu dan curah hujan di Stasiun Klimatologi KHDTK Haurbentes diperoleh rata-rata suhu tertinggi dicapai pada bulan September ( $28^{\circ}$  C) dan terendah pada bulan Februari ( $23^{\circ}$  C), sementara curah hujan tertinggi (475 mm) terjadi pada bulan April dan terendah (199 mm) terjadi pada bulan Agustus, dengan rata-rata curah hujan tahunan 4.276 mm. Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Fergusson (1951), tipe curah hujan di wilayah ini termasuk tipe A dan tidak memiliki bulan kering. Tanah di daerah ini terdiri dari tiga jenis tanah yaitu Podsolik Merah Kuning, Regosol, dan Podsolik Coklat (Marali, Masano, dan Bachri, 1980). Topografinya bervariasi dari datar sampai sangat curam dengan variasi kelerengannya dari 8 % sampai  $>$  45 %.

Kawasan hutan ini dilewati oleh jalan umum yang diperkeras dengan lapisan penutup aspal sepanjang  $\pm$  500 m, lebar 3 m. Di dalam KHDTK ini terdapat fasilitas

rumah tinggal yaitu sebuah mess dengan luas 126 m<sup>2</sup> dan sebuah rumah untuk petugas lapangan dengan luas 106 m<sup>2</sup>. Sarana air bersih sudah tersedia sedangkan fasilitas pencrangan yang ada berasal dari aliran listrik Perusahaan Listrik Negara.

Penelitian pola kolaboratif dalam pengelolaan KHDTK Haurbentes ini dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2004.

### B. Metode Pengumpulan Data

Untuk menggali potensi KHDTK Haurbentes yang dapat dikolaborasikan dengan *stakeholder* lain telah dilakukan pengumpulan data di lapangan dengan menggunakan metode penelitian melalui observasi lapangan dan wawancara dengan responden terpilih. Setelah diperoleh data awal dilanjutkan dengan diskusi kelompok/*Focus Group Discussion* (FGD) untuk penarikan kesimpulan secara umum. Pemilihan responden dilakukan secara *purposive* (*Purposive Random Sampling*) terhadap pihak yang terkait dengan KHDTK Haurbentes. Masyarakat yang dipilih sebagai sampel responden adalah masyarakat yang sudah memanfaatkan hutan Haurbentes secara intensif. Pemda setempat dan Perhutani diambil sebagai responden karena lokasi yang berdekatan dengan kawasan KHDTK. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian lain yang kegiatan belajar/mengajar serta penelitiannya dilakukan di areal KHDTK juga merupakan obyek penelitian

ini. Dari hasil wawancara dengan responden terpilih diharapkan dapat diperoleh informasi tentang potensi yang ada di KHDTK Haurbentes, baik potensi fisik, sosial ekonomi dan budaya, permasalahan dalam pengelolaannya, persepsi responden, serta peluang kerjasama yang dapat dilakukan. Setelah diperoleh informasi dasar yang diperlukan akan dilanjutkan dengan diskusi kelompok (FGD) untuk mensintesis informasi yang diperoleh. Dengan diperolehnya berbagai informasi dasar di atas diharapkan dapat disusun acuan berupa langkah-langkah yang perlu dilakukan segera serta acuan dasar bagi penyusunan *action plan* untuk pengelolaan jangka panjang. Responden yang diwawancarai dibagi dalam beberapa kelompok seperti disajikan pada Tabel 1.

### C. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder diolah dengan cara tabulasi silang dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Identitas Responden yang Diwawancara

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, ada tiga kelompok responden yang diwawancara dalam penelitian ini yaitu masyarakat sekitar, PT (dosen dan mahasiswa), dan para peneliti dari lembaga penelitian lain serta personil Pemda dan Perum Perhutani. Dari hasil

Tabel (Table) 1. Kelompok responden yang diwawancara (*Target groups which was interviewed*)

No (Number)	Kelompok responden (Target groups)	Jumlah responden (Number of respondents)	Keterangan (Note)
1	Masyarakat setempat (Local community)	19	Penduduk yang memanfaatkan KHDTK Haurbentes (Local community who utilize KHDTK Haurbentes)
2	Perguruan tinggi serta lembaga penelitian lain (Universities and other research institutions)	16	Staf pengajar IPB dan UNB, mahasiswa serta karyawan, Biotrop, Biofarmaka, Kebun Raya (Lecturer from IPB and UNB, under and/or graduate/post graduate students, administrative staff, researcher from BIOTROP, Biofarmaka, and Bogor Botanical Garden)
3	Pemda dan Perum Perhutani (Local government and Perum Perhutani)	5	Kepala Desa Curug dan Jugalajaya, serta pihak Kecamatan Jasinga (Head of Curug and Jugalajaya village and personnel from Jasinga sub district)

wawancara didapatkan bahwa mayoritas masyarakat sekitar KHDTK Haurbentes ada pada usia produktif ( $\geq 17$  tahun dan  $\leq 55$  tahun) yaitu sebesar 94 %, sedangkan 6 % responden ada pada usia tidak produktif. Tingkat pendidikan responden umumnya relatif rendah (SD tidak tamat) dan hanya sebagian kecil saja yang mencapai jenjang pendidikan SMP (2 orang) dan perguruan tinggi (D2) (1 orang). Pekerjaan utama responden bervariasi dari pegawai negeri, petani, tukang bangunan, buruh dan sopir ojek, sedangkan pekerjaan sampingan responden adalah berdagang, buruh bangunan, dan buruh tani. Mayoritas responden umumnya adalah penduduk asli dan hanya sebagian kecil yang merupakan pendatang dari luar daerah. Rata-rata pemilikan lahan relatif sempit. Dari seluruh responden yang diwawancara hanya 16 % yang memiliki lahan garapan sawah dengan

rata-rata pemilikan seluas 0,35 ha. Begitu pula dengan pemilikan kebun, tidak semua responden memilikinya (42 %) (Tabel 2).

Gambaran umum tentang responden dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian lain dapat dilihat pada Tabel 3.

Sedangkan gambaran umum tentang responden yang berasal dari pemerintah daerah setempat dan Perum Perhutani disajikan pada Tabel 4.

### B. Persepsi Responden terhadap KHDTK Haurbentes

Persepsi merupakan proses akal manusia dalam menerima rangsangan suatu obyek melalui panca indera yang kemudian diproyeksikan oleh si individu menjadi suatu penggambaran tentang obyek tersebut. Hal ini menjadi titik tolak sikap, tindakan, dan perilaku seseorang (Koentjaraningrat, 1986 dalam Pitaya, 2001). Persepsi selain

Tabel (Table) 2. Profil masyarakat sekitar KHDTK Haurbentes (*Profile of local community surrounding KHDTK Haurbentes*)

No (Number)	Kriteria (Criteria)	Persentase (Percentage) (%)	Keterangan (Note)
1	Rata-rata umur responden ( <i>Average age of respondents</i> )		
	b. Produktif ( <i>Productive age</i> ) ( $\geq 17$ dan $\leq 55$ )	94	-
	c. Tidak produktif ( <i>Non productive age</i> ) ( $\leq 17$ dan $\geq 55$ )	6	-
2	Tingkat pendidikan ( <i>Level of education</i> )		
	a. SD (tamat dan tidak tamat) ( <i>Elementary; finish/not finish</i> )	84,2	-
	b. SMP atau sederajat ( <i>Junior high school</i> )	10,5	SMP umum dan Pesantren ( <i>Junior high &amp; Islamic school</i> )
	c. PT ( <i>Universities</i> )	5,3	D2, UT ( <i>Diploma, Universities</i> )
3	Pekerjaan utama ( <i>Main jobs</i> )		
	a. Petani ( <i>Farmer</i> )	47,4	-
	b. Buruh tani ( <i>On-farm labour</i> )	21	-
	c. Buruh di luar usahatani/tukang ( <i>Off-farm labour</i> )	10,5	-
	d. Pegawai Negeri ( <i>Civil servant</i> )	5,3	-
	e. Lain-lain ( <i>Others</i> )	15,8	Sopir angkot, ojek, dan lain-lain ( <i>Drivers of car and motorcycle, etc</i> )
4	Pemilik lahan ( <i>Land Owner</i> )		
	a. Sawah ( <i>Rice field</i> )	16	-
	b. Kebun ( <i>Mixed garden</i> )	42	-
	c. Tegall ( <i>Dry field</i> )	-	-

Sumber (Source): Analisis data primer (*Primary data analysis*)

Tabel. (Table) 3. Identitas responden dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian lain (*Identity of respondents from universities and other research institutions*)

No (Number)	Jabatan (Position)	Umur (th) (Age, years)	Pendidikan (Education)	Instansi (Institution)
1	Dosen (Lecturer)	38	S3 (PhD)	Fahatan IPB (Faculty of Forestry, IPB)
2	Karyawan (Administrative staff)	35	S1 (Bachelor)	Fahatan UNB (Faculty of Forestry, UNB)
3	Dekan (Dean)	62	S3 (PhD)	Fahatan UNB (Faculty of Forestry, UNB)
4	Dosen (Lecturer)	50	S2 (Master)	Fahatan IPB (Faculty of Forestry, IPB)
5	Mahasiswa (Student)	28	Mahasiswa Pasca Sarjana (Graduate student)	Fahatan IPB (Faculty of Forestry, IPB)
6	Staf honorer (Administrative staff)	24	Diploma Budidaya Hutan (Diploma)	Fahatan IPB (Faculty of Forestry, IPB)
7	Mahasiswa (Student)	41	Mahasiswa Pasca Sarjana (Graduate student)	Fahatan IPB (Faculty of Forestry, IPB)
8	Asisten peneliti (Research assistant)	24	S1 (Bachelor)	Fahatan IPB (Faculty of Forestry, IPB)
9	Mahasiswa (Student)	25	Mahasiswa S2 (Graduate student)	Fahatan IPB (Faculty of Forestry, IPB)
10	Mahasiswa (Student)	30	Mahasiswa (Student)	Fahatan IPB (Faculty of Forestry, IPB)
11	Dosen (Lecturer)	40	S3 (PhD)	Fahatan IPB (Faculty of Forestry, IPB)
12	Dosen (Lecturer)	52	S3 (PhD)	Fahatan IPB dan Biofarmaka (Faculty of Forestry, IPB and research staff of Biofarmaka)
13	Dosen (Lecturer)	51	S1 (Bachelor)	Fahatan UNB (Faculty of Forestry, UNB)
14	Peneliti (Researcher)	40	S2 (Master)	SEAMEO BIOTROP
15	Kasubbid Reintroduksi Tumbuhan Langka (Head of rare plant reintroduction sub division)	42	S2 (Master)	Kebun Raya Bogor (LIPI) (Bogor Botanical Garden)
16	PKT Kebun Raya Bogor	36	S1 (Bachelor)	Kebun Raya Bogor (LIPI) (Bogor Botanical Garden)

Sumber (Source): Analisis data primer (*Primary data analysis*)Tabel (Table) 4. Identitas responden terpilih dari pemda setempat dan Perum Perhutani (*Identity of respondents from local government and Perum Perhutani*)

No (Number)	Jabatan (Position)	Umur (th) (Age, years)	Pendidikan (Education)	Instansi (Institution)
1	Karyawan (Administrative staff)	55	SMA (Senior high school)	Perum Perhutani KPH Bogor
2	Karyawan (Administrative staff)	53	SMA (Senior high school)	Perum Perhutani KPH Bogor
3	Staf Kecamatan Jasinga (Administrative staff of Jasinga sub-district)	39	SMA (Senior high school)	Kantor Kecamatan Jasinga (Jasinga sub district office)
4	Kepala Desa Curug (Head of Curug village)	39	SMP (Junior high school)	Desa Curug (Curug village)
5	Kepala Desa Jugalajaya (Head of Jugalajaya village)	40	SMA (Senior high school)	Desa Jugalajaya (Jugalajaya village)

Sumber (Source): Analisis data primer (*Primary data analysis*)

dipengaruhi oleh faktor pribadi juga dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan yang berlaku di lingkungannya. Faktor pribadi yang cukup dominan dalam membentuk persepsi seseorang umumnya adalah pendidikan dan latar belakang sosial dan ekonomi si individu. Dari hasil wawancara dengan responden terpilih diperoleh gambaran bahwa persepsi mereka terhadap keberadaan KHDTK Haurbentes cukup baik. Walaupun latar belakang pendidikan dan kondisi sosial ekonomi ketiga kelompok responden cukup beragam, namun secara umum semua responden sudah memahami fungsi serta manfaat keberadaan HP Haurbentes. Setiap kelompok masyarakat sudah memanfaatkan KHDTK dengan berbagai pertimbangan dan tujuan masing-masing, baik untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, konservasi, bisnis maupun ekonomi.

### **1. Persepsi Masyarakat Sekitar KHDTK**

Pengelolaan KHDTK dimaksudkan untuk membangun model pengelolaan hutan yang bisa menjadi contoh pengelolaan hutan yang lestari. Setiap KHDTK mempunyai tujuan pengelolaan yang unik dan mungkin berbeda satu dengan yang lain karena kondisi fisik hutannya serta tipologi masyarakat yang ada di sekitarnya yang beragam. Di KHDTK Haurbentes, masyarakat sekitar sudah mengetahui keberadaan serta manfaat KHDTK. Ketergantungan warga sekitar terhadap KHDTK cukup tinggi, baik sebagai tempat mencari kayu bakar, mencari rumput pakan ternak serta mencari benih/bibit tanaman untuk dijual. Kebiasaan untuk mengambil hasil hutan ini sudah berlangsung lama, namun pengumpulan benih/bibit tanaman untuk dijual secara resmi baru berlangsung sejak dua tahun lalu.

### **2. Persepsi Pemerintah Daerah dan Perum Perhutani**

Bagi Pemda setempat, KHDTK merupakan salah satu potensi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai kegiatan dalam rangka menambah pemasukan kas desa, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

serta perbaikan sarana dan prasarana desa secara umum.

Respon Perum Perhutani terhadap keberadaan KHDTK Haurbentes juga sangat positif. Dengan adanya pengelolaan KHDTK Haurbentes yang baik, Perum Perhutani berharap akan ada kerjasama yang saling menguntungkan khususnya dalam hal pengamanan hutan karena lokasi KHDTK berbatasan dengan kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani. Selain kerjasama dalam hal pengamanan hutan, Perum Perhutani juga bersedia mengadakan kerjasama dalam rangka pengelolaan kawasan KHDTK Haurbentes yang menyangkut pembinaan masyarakat sekitar KHDTK, baik secara teknis maupun non teknis.

### **3. Persepsi Pihak Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Lain**

Bagi perguruan tinggi yang lokasinya berdekatan dengan KHDTK seperti IPB dan UNB, HP Haurbentes dimanfaatkan sebagai tempat praktek mahasiswa, lokasi penelitian untuk penyusunan skripsi/tesis serta tempat kegiatan penelitian umum lainnya. Kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan ini sudah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum KHDTK diperluas menjadi 100 ha. Sementara itu bagi lembaga penelitian lain seperti Kebun Raya (LIPI), SEAMEO-Biotrop serta Biofarmaka, KHDTK Haurbentes merupakan sumber plasma nutfah di mana para peneliti dapat mengadakan penelitian serta mengumpulkan berbagai koleksi tumbuhan langka untuk kemudian diteliti dan diujicobakan di tempat lain.

Dengan adanya kesamaan persepsi yang positif di antara berbagai *stakeholder* yang terkait dengan KHDTK Haurbentes ini diharapkan akan muncul inisiatif untuk berpartisipasi secara aktif dan swadaya dalam berbagai kegiatan yang akan dikembangkan dalam KHDTK Haurbentes pada masa mendatang. Namun Sen dan Das (1987) dalam Sutrisno (1994) mengingatkan bahwa partisipasi mungkin terlaksana jika dalam pengembangan suatu model kegiatan diciptakan suasana yang partisipatif. Dua masalah penting yang harus dipelajari

selanjutnya adalah pada tahapan kegiatan yang mana serta sejauh mana berbagai *stakeholder* tersebut dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan KHDTK yang akan dikolaborasikan. Selanjutnya Nasikun (1990) menyatakan bahwa konsep partisipasi bukan hanya diartikan secara sempit sekedar melibatkan berbagai *stakeholder* dalam suatu kegiatan tertentu saja melainkan harus mengandung elemen inisiatif dan keputusan dari pihak-pihak yang berpartisipasi. Oleh karena itu dalam menyusun *action plan* pengelolaan KHDTK Haurbentes, sejak awal berbagai *stakeholder* terkait tersebut harus dilibatkan serta diakomodir kepentingannya. Jika hal ini dapat terlaksana dengan baik, maka peluang kerjasama yang dapat dikembangkan pada masa yang akan datang dapat terbuka lebar sehingga pengelolaan KHDTK Haurbentes dapat berjalan secara efektif dan efisien.

### C. Prospek Kolaborasi KHDTK Haurbentes

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, melihat potensi yang ada di KHDTK Haurbentes (lokasi yang relatif dekat serta mudah dijangkau, keanekaragaman jenis pohon, baik dari suku *Dipterocarpaceae* dan *non Dipterocarpaceae* dan jenis rotan serta fauna yang ada) maka peluang kolaborasi di KHDTK dengan berbagai *stakeholder* terkait cukup besar. Selain potensinya yang cukup besar, pengelolaan hutan secara kolaboratif di KHDTK Haurbentes memang sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena berbagai pertimbangan di antaranya (i) lokasi tersebut sangat rentan terhadap timbulnya konflik atas sumberdaya hutan; (ii) keterbatasan rumah tangga penduduk sekitar KHDTK dari segi modal, manajemen, dan pemasaran; serta (iii) Departemen Kehutanan saat ini sedang bersemangat melakukan langkah-langkah untuk mengembangkan program Perhutanan Sosial (*Social Forestry*) dan menjadikan sumberdaya hutan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat lokal yang dinamis. Namun untuk kondisi KHDTK Haurbentes, aplikasi *social forestry* secara penuh sulit untuk dilaksanakan karena KHDTK sesuai dengan

Keputusan Menteri Kehutanan No. 289/KPTS-II/2003 penggunaannya ditetapkan sebagai hutan penelitian dan pengelolaannya diserahkan kepada Badan Litbang Kehutanan. Dengan demikian tujuan pengelolaan kawasan yang utama adalah untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan walaupun tidak tertutup kemungkinan juga pengembangan kegiatan yang bersifat bisnis (*profit oriented*).

### D. Kegiatan Kolaborasi di KHDTK Haurbentes yang Telah Dilakukan

Sejak dua tahun yang lalu, kerjasama antara pengelola KHDTK Haurbentes (Badan Litbang Kehutanan c.q. Kantor Pengelola Hak Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi Kehutanan/KP-KIATHUT) dengan masyarakat setempat sudah mulai dilaksanakan. KP-KIATHUT adalah institusi/lembaga yang dibentuk antara Badan Litbang Departemen Kehutanan dengan Yayasan Bakti Rimbawan dan berkedudukan di Bogor dengan tugas sebagai penghubung antara Badan Litbang Kehutanan dengan mitra kerja kehutanan, terutama di dalam perlindungan kekayaan intelektual, pelayanan alih teknologi, dan pelayanan satu pintu bagi mitra bisnis kehutanan. Tujuan kegiatan kolaborasi selain untuk memanfaatkan potensi kawasan KHDTK dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat setempat, juga dimaksudkan untuk menata ulang dan meredam berbagai kegiatan secara *illegal* (pengumpulan bibit/benih *Shorea* spp.) yang dilakukan dalam kawasan KHDTK. Dengan adanya kegiatan kolaboratif ini masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan pengumpulan bibit/benih *Shorea* spp. terutama *Shorea selanica* dan *Shorea leprosula* sehingga diharapkan konflik sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan dapat dihindari. Hal ini sejalan dengan pendapat Jeffrey dan Vira (2001) dalam Suharjito (2004) yang menyatakan bahwa pengelolaan sumberdaya alam dengan melibatkan masyarakat adalah hal yang sangat penting karena sebenarnya masyarakat lokal mempunyai kekuatan (*power*) untuk merusak/mengganggu

rencana-rencana yang diimplementasikan oleh pihak lain. Selanjutnya Suharjito (2004) juga mengemukakan bahwa pengelolaan hutan secara kolaboratif yang menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama memberi kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengelola sumberdaya hutan sehingga meredakan peluang terjadinya konflik sosial kemasyarakatan dengan pihak pengelola hutan lainnya. Dengan adanya model kolaborasi ini masing-masing pihak yang berkolaborasi dapat mengaktualisasikan kepentingannya dalam suasana *win-win solution* (saling menguntungkan).

Dalam kegiatan kolaborasi tersebut, pada musim pembuahan masyarakat setempat diminta mengumpulkan benih/bibit *Shorea* spp., menyemaikannya hingga tumbuh dan kemudian memasarkannya melalui KP-KIATHUT sebagai perpanjangan tangan dari Badan Litbang Kehutanan. Namun karena dana yang tersedia pada KP-KIATHUT sangat terbatas (selama ini dana yang tersedia untuk operasional kegiatan KP-KIATHUT mayoritas berasal dari swadaya pengurus), tidak semua bibit yang ditawarkan dapat seluruhnya dipasarkan. Bagi masyarakat yang sudah terlanjur terikat kontrak dengan KP-KIATHUT (mengambil uang muka dari KP-KIATHUT), mereka tidak boleh memasarkan bibit tersebut kepada pihak lain selain KP-KIATHUT sehingga terpaksa menunda pemasaran bibit tersebut sampai dana KP-KIATHUT tersedia. Namun bagi masyarakat yang belum mengambil uang muka dari KP-KIATHUT banyak yang kemudian secara sembunyi-sembunyi memasarkannya ke pihak luar. Hal ini dapat menjadi preseden buruk bagi warga lain yang sudah terikat kontrak dengan KP-KIATHUT. Apalagi jika pemasaran di luar menawarkan harga yang cukup bersaing, hal ini dapat disalahgunakan untuk keuntungan pihak-pihak tertentu. Jika hal ini berlangsung secara terus menerus, maka tujuan kerjasama yang sudah dibangun tidak pernah akan tercapai.

Untuk itu berbagai permasalahan serta peluang terjadinya konflik dalam pengelolaan KHDTK Haurbentes perlu diantisipasi sebelumnya agar tujuan pemanfaatan kawasan bagi peningkatan kesejahteraan

masyarakat sekitar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Beberapa alternatif solusi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan pendanaan antara lain adalah:

1. Mulai mengarahkan KHDTK Haurbentes dan KHDTK lain sebagai unit pengelolaan berbasis bisnis (*profit oriented*).
2. Mengembangkan KHDTK lain yang berpotensi untuk subsidi silang bagi KHDTK yang kurang berpotensi.
3. Secara proaktif mengadakan pendekatan kepada sumber dana potensial (*potential donor agency*) seperti mengadakan kerjasama dengan pengusaha dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
4. KP-KIATHUT bersama-sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan mengadakan promosi melalui pameran atau pertemuan antara peneliti, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam/Unit Pelaksana Teknis dan mitra usaha kehutanan.
5. Apabila terdapat pengusaha yang berminat untuk membeli dan/atau melakukan kerjasama alih teknologi, maka dapat langsung diadakan perjanjian kerjasama dengan KP-KIATHUT. Hal ini untuk menghindari peluang pemanfaatan oleh parapihak, baik pribadi maupun lembaga yang tidak bertanggung jawab.

#### **E. Model Pengelolaan KHDTK Haurbentes**

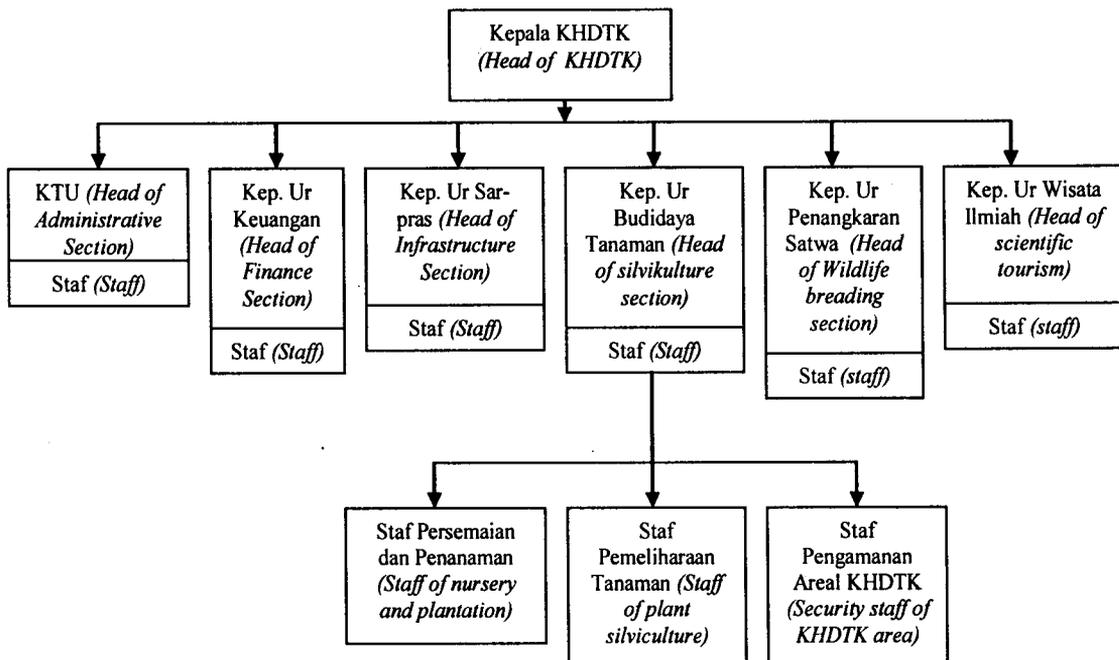
Pengelolaan KHDTK Haurbentes belum didasarkan pada rencana kerja yang baku. Semua kegiatan hanya dilakukan menurut kebutuhan sesaat dan ketersediaan dana. Administrasi kegiatan belum dapat dilaksanakan secara kontinyu dan informasi tentang kondisi dan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan di KHDTK Haurbentes hanya dilaporkan secara insidental. Hal ini disebabkan KHDTK ini belum mempunyai otoritas sebagai unit manajemen yang mandiri sehingga tidak mempunyai rencana kerja maupun rencana anggaran.

KHDTK Haurbentes dipimpin oleh seorang kepala kebun yang dibantu oleh seorang pegawai tetap dan dua tenaga harian lepas. Seluruh aktivitas kegiatan rutin dilakukan secara bersamaan oleh mereka bertiga tanpa ada pembagian tugas (*job description*) dan prosedur kerja (*standard operation procedure*) yang jelas dan hanya didasarkan pada pedoman pelaksana kegiatan umum yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan atau buku panduan yang tersedia atau menurut kebutuhan peneliti. Badan Litbang Kehutanan dan PT. Rekayasa APP (1993) menyebutkan bahwa beberapa kelemahan utama dalam sistem kelembagaan di kehutanan antara lain adalah kurangnya tenaga fungsional yang secara profesional mampu berfungsi sesuai bidangnya, belum adanya desentralisasi kekuasaan serta kurangnya tenaga, fasilitas, dan insentif di lapangan. Oleh karena di masa mendatang pengelolaan akan lebih luas serta beragam dari sebelumnya, maka pada struktur organisasi KHDTK Haurbentes perlu

dilakukan pembenahan agar pengelolaan kawasan dapat berjalan secara optimal. Untuk itu beberapa modifikasi dalam struktur organisasi pelaksana di lapangan perlu dimodifikasi sebagaimana Gambar 1.

Dengan struktur organisasi yang baru ini, personil yang bertugas di KHDTK Haurbentes akan bertambah menjadi 15 orang yang terdiri satu orang kepala kebun dibantu enam orang kepala urusan yaitu urusan administrasi, keuangan, sarana prasarana, budidaya tanaman, penangkaran satwa, dan wisata ilmiah, serta delapan orang staf pembantu. Adapun kualifikasi yang dibutuhkan untuk petugas kebun tersebut antara lain adalah:

1. Tenaga ahli yang mempunyai dedikasi serta kemampuan manajerial yang baik untuk mengelola dan mengembangkan KHDTK Haurbentes serta mempunyai kemampuan berkoordinasi dan bernegosiasi dengan pihak luar yang akan melakukan kerjasama di KHDTK Haurbentes.



Gambar (Figure) 1. Struktur Organisasi KHDTK Haurbentes (*Organizational structure of KHDTK Haurbentes*)

Sumber (Source): Fahutan IPB dan Badan Litbang Kehutanan, Modifikasi (1999) (*Faculty of Forestry, IPB and Agency for Forestry Research and Development*)

2. Teknisi administrasi yang mampu melaksanakan kegiatan administrasi dan tata usaha pada umumnya.
3. Teknisi keuangan yang memahami tata laksana keuangan serta analisis keuangan sederhana.
4. Teknisi yang menguasai teknik dan konstruksi bangunan.
5. Teknisi silvikultur yang memahami teknik budidaya dan pemeliharaan tanaman.
6. Teknisi yang memahami teknik penangkaran satwa.
7. Teknisi yang memahami kegiatan wisata ilmiah.

Dengan struktur organisasi yang baru ini diharapkan pengelolaan KHDTK Haurbentes akan lebih terarah dan dilaksanakan secara profesional, baik yang menyangkut mekanisme koordinasi antar unit kerja di lingkup Badan Litbang Kehutanan, dengan instansi terkait lain, dengan pihak swasta seperti KP-KIATHUT, BUMN maupun koperasi kehutanan, serta dengan pihak lainnya (Badan Litbang Kehutanan dan PT Rekayasa APP, 1993). Di samping itu bentuk peraturan/ regulasi yang menyangkut pemanfaatan KHDTK Haurbentes juga perlu diformulasikan disertai dengan upaya penegakan hukum dalam menerapkan sistem sanksi dan hukuman bagi setiap bentuk pelanggaran pemanfaatan KHDTK.

#### F. Permasalahan

Dalam kegiatan kolaborasi (khususnya pemanfaatan lahan negara seperti KHDTK Haurbentes), selain harus memberikan keuntungan finansial bagi pihak-pihak yang berkolaborasi, perlu juga memperhitungkan *opportunity cost* dari alokasi lahan, waktu, tenaga serta modal yang dicurahkan dalam kegiatan kolaborasi tersebut apakah cukup bersaing dibandingkan aktivitas/kegiatan lainnya. Dengan demikian pengkajian secara mendalam dan komprehensif tentang layak tidaknya suatu kegiatan dikolaboratifkan (ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi) mutlak diperlukan sebelumnya.

Dengan melihat persepsi responden yang diwawancarai, potensi yang ada di KHDTK serta peluang pengembangannya maka

kerjasama kolaboratif dengan berbagai *stakeholder* terkait sangat prospektif untuk dilaksanakan. Namun di sisi lain ada beberapa permasalahan yang perlu pemikiran lebih jauh serta mendapat penanganan segera jika kerjasama dilaksanakan. Berbagai permasalahan yang perlu diantisipasi antara lain adalah:

1. Rumusan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama kolaboratif KHDTK secara rinci dan jelas yang tertuang dalam akte kesepahaman. Perumusan akte kesepahaman ini harus didiskusikan secara partisipatif dengan semua pihak yang bekerjasama. Pada kondisi di mana kegiatan kolaborasi membentuk hubungan yang asimetrik di mana salah satu pihak mempunyai posisi yang lebih kuat dibandingkan pihak lain, maka kolaborasi yang terbentuk akan sulit mewujudkan *fairness, keadilan, dan keseimbangan*.
2. Rumusan tentang pembagian keuntungan dan resiko yang dihadapi sebagai konsekuensi dari diadakannya kegiatan kolaborasi.
3. Masalah pendanaan; dana yang dibutuhkan untuk kerjasama ini cukup besar, karena itu perlu dipikirkan di mana saja sumber dana utama dan alternatif yang tersedia (pengusaha, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan).
4. Masalah peningkatan kesadaran dan kemandirian masyarakat sekitar KHDTK; masyarakat sekitar perlu mendapat penyuluhan secara intensif dan kontinyu, baik menyangkut teknik budidaya, manajemen keuangan maupun pentingnya menjaga keamanan dan kelestarian hutan Haurbentes.
5. Masalah pengawasan terhadap kegiatan yang berlangsung dalam KHDTK; hal ini untuk menghindari agar akses yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat masuk dalam KHDTK tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6. Masalah keterbatasan SDM; dalam mengelola KHDTK yang cukup luas

tersebut (100 ha) diperlukan SDM yang tidak hanya berdedikasi tinggi terhadap pengembangan KHDTK namun juga yang memiliki keahlian yang diperlukan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Peluang kerjasama kolaborasi di KHDTK Haurbentes sangat prospektif untuk dilakukan. Hal ini dibuktikan bahwa berbagai *stakeholder* yang terkait dengan keberadaan KHDTK Haurbentes sangat berminat mengadakan kerjasama secara intensif dengan pihak Badan litbang Kehutanan.
2. Untuk merealisasikan agar kerjasama tersebut dapat memberikan manfaat yang signifikan, perlu dilakukan pertemuan/diskusi secara rutin dan intensif dengan pihak terkait.
3. Beberapa masalah yang perlu diantisipasi dalam kerjasama kolaboratif di KHDTK Haurbentes adalah masalah kejelasan hak dan kewajiban, pembagian keuntungan dan resiko pihak-pihak yang akan berkolaborasi, masalah dana, masalah upaya peningkatan kesadaran dan kemandirian masyarakat sekitar KHDTK serta pengawasan kegiatan yang berlangsung di KHDTK. Oleh karena itu perlu dibuat nota kesepahaman sebagai dasar pegangan dalam pelaksanaan kolaborasi.
4. Dalam penetapan alternatif bentuk kegiatan/kerjasama yang akan dikolaborasikan perlu dilakukan pengkajian secara mendalam dan komprehensif agar dapat dirumuskan alternatif kegiatan yang layak secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan PT. Rekayasa APP. 1993. Pola umum dan pewilayahan penelitian kehutanan di Indonesia. Badan Litbang Kehutanan. Jakarta.

Fakultas Kehutanan IPB dengan Badan Litbang Kehutanan. 1999. Design

engineering pengelolaan Kebun Percobaan Haurbentes. Badan Litbang Kehutanan. Jakarta.

- Keputusan Menteri Kehutanan No. 288/KPTS-II/2003 Tanggal 26 Agustus 2003. Tentang Penunjukan Hutan Haurbentes seluas  $\pm$  100 ha sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK).
- Keputusan Menteri Kehutanan No. 289/KPTS-II/2003 Tanggal 26 Agustus 2003. Tentang Penggunaannya Sebagai Hutan Penelitian dan Pengelolaannya Diserahkan Kepada Badan Litbang Kehutanan.
- Marali M., Masano & S. Bachri. 1980. Tanah tempat tumbuh tanaman tengkawang dalam rangka penelitian kemampuan wilayah di Jawa Barat. Lembaga Penelitian Tanah. Bogor
- Nasikun, 1990. Pencilan pemikiran Fisipol-UGM tentang pembangunan. Fisipol-UGM. Yogyakarta
- Pitaya, B. 2001. Persepsi masyarakat tentang alang-alang. Jurnal Hutan Rakyat III (2). Pusat Kajian Hutan Rakyat Bagian Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan UGM. Yogyakarta.
- Schmidt, F.H. dan J.H.A. Fergusson. 1951. Rainfall types based on wet and dry period ratios for Indonesia with Western New Guinea. Verh. No. 42. Direktorat Meteorologi dan Geofisika. Jakarta.
- Suharjito. 2004. Pengelolaan hutan negara pola kolaboratif perusahaan HPH(TI) dan masyarakat lokal: Prospek dan kendala. Jurnal Kehutanan Masyarakat 2 (2) : 6-19. Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM). Bogor.
- Sutrisno, L. 1994. Sosial forestry development, two words social & forestry in Indonesia. FAO-APAN. FAO Regional Wood Energy Development Program in Asia. Bangkok, Thailand.